



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN TIKI JNE dan BUKALAPAK**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	15 (lima belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 21 Maret 2018
P u k u l	:	14.00 s.d. 16.15 WIB
Tempat	:	Eks Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Wahyu Sanjaya, SE
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	10 dari 30 Anggota
Tamu	:	Buka Lapak & Muhamad Fikri (Head Comunity), TIKI JNE, M.Feradi (CEO), Trian Yusema (Deputi GM)

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pimpinan JNE dan Pimpinan Bukalapak untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh JNE dan Bukalapak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh JNE dan Bukalapak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

- **TIKI JNE**

1. Saat ini TIKI JNE merupakan perusahaan swasta tertutup, dan dalam kegiatannya juga memberikan dukungan bagi wirausaha yang ada di desa sesuai dengan kompetensi terhadap barang-barang yang ada di daerah tersebut, meskipun yang dapat terserap oleh TIKI JNE hanya 8% barang-barang dari UMKM walaupun potensi yang ada sangatlah besar.
2. Maraknya *e-commerce* menyebabkan banyak barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan mudah, dan sosial media serta platform memberikan kemudahan dalam pemasaran produk yang ada saat ini.
3. Peranan TIKI JNE sebagai pengangkut akan memangkas proses pengiriman barang agar menjadi lebih sederhana karena pada dasarnya bisnis di JNE berorientasi pada kecepatan, yang mana hal ini sangat ditentukan dari kuota kargo pengiriman barang yang ada saat ini. Adanya penambahan kuota kargo bagi jasa pengangkutan akan mempercepat proses distribusi barang.
4. TIKI JNE mendukung RUU Kewirausahaan Nasional karena hal ini dapat melahirkan kewirausahaan dan kewirausahaan sosial dan setuju dengan definisi wirausaha yang ada di Pasal 1 RUU dimaksud serta mengusulkan kementerian yang ditunjuk menjadi *leading sector* haruslah jelas.
5. Logistik perlu dibangun di pedesaan. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi wirausaha yang bergerak di bidang perikanan, pertanian, dan kehutanan untuk memasarkan produk mereka dengan mudah. Terkait dengan hal ini TIKI JNE dan Pos siap untuk membangun kemitraan dengan wirausaha di desa untuk mengembangkan produknya karena pada dasarnya hal ini ditujukan untuk mensejahterakan rakyat di desa.
6. Locus atau tempat dari wirausaha harus diperjelas dan jika berkaitan dengan Desa maka disinkronisasikan dengan Undang-Undang tentang Desa.

- **BUKALAPAK**

1. Bukalapak memiliki komunitas UMKM yang tersebar di 86 kota dan telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan pelakunya.
2. Pemberdayaan kewirausahaan yang telah dilakukan Bukalapak yakni terkait fungsi inkubator.

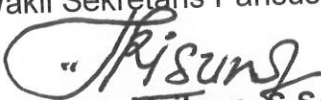
3. Saat ini bukalapak hanya menjual hal yang berupa barang saja dan untuk Jasa belum bisa difasilitasi perdagangannya di Bukalapak seperti jasa salon, dll.
4. Bukalapak menyatakan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi inkubator kewirausahaan masih sangat kurang oleh karena itu Pemerintah Daerah harus didorong agar dapat memfasilitasi inkubator kewirausahaan tersebut agar para wirausaha muda dapat semakin meningkat.
5. Selain itu, ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan menyediakan inkubator kewirausahaan dikarenakan minimnya pengetahuan teknis Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan inkubasi salah satunya dalam penggunaan teknologi terutama internet.
6. Bukalapak memandang perlu adanya Data Base Pengusaha di seluruh Indonesia dan hal ini perlu disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan tidak adanya *database* ini akan menyulitkan para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan serta mengakibatkan ketidakefektifan usaha yang dibangun di tingkat pusat dan daerah, serta kurang berkembangnya wirausaha pemula di daerah.
7. Definisi UMKM yang terdapat dalam UU tentang UMKM tumpang tindih dengan terminologi bisnis.
8. Infrastruktur bagi wirausaha di daerah masih sangat terbatas terutama dalam pemberdayaan wirausaha, misalnya akses penggunaan internet. Seharusnya Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan kemitraan antara pmda dan swasta dalam penyediaan infrastruktur.
9. Terkait dengan perpajakan saat ini belum ada arahan yang pasti. Terdapat kekhawatiran dari pengusaha online jika ada aturan tentang pajak, maka dapat memperlambat perekonomian dari pelaku usaha.
10. Definisi wirausaha menurut bukalapak adalah setiap warga negara yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi dirinya dan orang lain.
11. UMKM yang bergabung dengan Bukalapak akhir tahun 2015 sebanyak 500.000 dan Februari 2018 terdapat 2,2 juta UMKM dan saat ini Bukalapak juga tengah mengedukasi para wirausaha muda terkait HAKI.
12. Akhir Tahun 2015 jumlah karyawan Bukalapak yaitu 150 orang, namun saat ini terdapat 1.400 karyawan yang bekerja di Bukalapak dan akhir tahun 2018 ditarget jumlah karyawan Bukalapak yakni sebanyak 3.000 orang.
13. Produk yang laris di Bukalapak: ada *virtual* produk dan produk fisik, sedangkan produk yang laris di *marketplace* yaitu *fashion* dan elektronik.
14. Dengan meningkatnya pembelanjaan elektronik maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bisnis *online*.

15. Untuk mencegah penipuan dalam *ecommerce*, ada *timeline* pembeli untuk meretur barang yang palsu dan jika barang yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan, maka perusahaan dapat di *freez* atau *domet* yang ada di Bukalapak tidak akan bisa diakses.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 16.15 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus


Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003